



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Manajemen (S2)
dan mencapai gelar Magister Manajemen

Oleh

Dinna Tri Yulihantini
NIM 150820101016

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

1. Ibu Sri Sumaryati (Alm) dan Bapak Hanafie (Alm) atas spiritnya.
2. Ibu Latifah (Alm) dan Bapak Chamim GH atas doanya.
3. Suami Abd. Haris atas doa, pengertian, dukungan dan kesabarannya.
4. Anak-anakku Najma Kayla Noorfazza, Muhammad Anugerah Pekerti atas pengertian, dukungan dan cintanya.
5. Saudara-saudaraku Dudy Eko Handoko, Denny Dwi Handriyani, Dardy Dwi Nugroho, Dandy Dwi Prihanto dan keponakanku semua atas doa dan dukungannya.

MOTO

مَنْ خَرَجَ فِي طَلَبِ الْعِلْمِ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barang siapa keluar untuk mencari Ilmu maka dia berada di jalan Allah “.

(HR. Turmudzi)

بِيْرِيْرٍ فَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَدِيرٌ

Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-

orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat.

Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

(Al-Mujadillah:11)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dinna Tri Yulihantini

NIM : 150820101016

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “ Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 21 Mei 2017

Yang menyatakan,

Dinna Tri Yulihantini

NIM. 150820101016

TESIS

**PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN JEMBER**

Oleh

Dinna Tri Yulihantini

NIM 150820101016

Pembimbing

Dosen Pembimbing Utama : Dr. Hari Sukarno, M.M

Dosen Pembimbing Anggota : Dr. Siti Maria Wardayati, Msi, Ak

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember” telah disetujui pada :

Hari, tanggal : Senin, 15 Mei 2017

tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Hari Sukarno, M.M
NIP. 196105301988021001

Dr. Siti Maria Wardayati, Msi, Ak
NIP.196608051992012001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Manajemen

Dr. Hari Sukarno, M.M
NIP. 196105301988021001

PENGESAHAN

Tesis berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa Terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember” karya Dinna Tri Yulihantini telah diuji dan disahkan pada :

Hari, tanggal : Minggu, 21 Mei 2017

tempat : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Tim Penguji:

Ketua,

Anggota I,

Prof. Dr. Raden Andi Sularso MSM
NIP. 196004131986031002

Dr. Alwan Sri Kustono M.Si, Ak
NIP. 197204162001121001

Anggota II,

Dr. Nurhayati M.M
NIP. 196106071987022001

Mengesahkan,
Dekan

Dr. Muhammad Miqdad, SE, MM, CA. Ak
NIP. 197107271995121001

RINGKASAN

Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember; Dinna Tri Yulihantini, 150820101016; 2017; 88 halaman; Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Kinerja keuangan desa merupakan tolak ukur dalam menilai akuntabilitas desa dalam memberikan pelayanan publik yang lebih baik. Kinerja keuangan desa dapat diketahui dengan mengukur rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai komponen dalam APBDes terhadap kinerja keuangan desa ditinjau dari aspek efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Selain itu penelitian ini menganalisis peran kemandirian keuangan desa dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Realisasi APBDes di 53 desa di wilayah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015-2016. Alat analisis yang digunakan adalah analisis jalur (*Path Analysis*). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belanja modal dan ADD tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. Anggaran belanja modal dan ADD tidak berperan dalam menciptakan kemandirian keuangan desa. Belanja modal berpengaruh negatif terhadap efektifitas kinerja keuangan desa, mengandung makna bahwa anggaran belanja modal yang meningkat tidak diikuti peningkatan relatif realisasi pendapatan desa terhadap anggaran pendapatan yang ada. Pemberian ADD tidak berdampak pada efektifitas kinerja keuangan desa, artinya penundaan pemberian Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber ADD yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Jember tidak mempengaruhi efektifitas kinerja keuangan

desa di Kabupaten Jember. Kemandirian keuangan desa tidak berperan membantu belanja modal dan ADD dalam mewujudkan efektifitas kinerja keuangan desa.

Ditinjau dari efisiensi kinerja keuangan desa, belanja modal mempunyai pengaruh negatif, hal ini dikarenakan adanya anggaran belanja modal yang tidak tepat guna dan pengelolaan yang kurang baik sehingga semakin besar belanja modal yang dianggarkan tidak diikuti peningkatan relatif realisasi belanja terhadap anggaran belanja desa yang telah. Sedangkan ADD berpengaruh positif dalam menentukan realisasi belanja terhadap anggaran belanja desa. Semakin besar ADD yang diterima setiap desa maka efisiensi kinerja keuangan desa akan meningkat. Kemandirian keuangan desa tidak mempengaruhi belanja modal dan ADD menciptakan kinerja keuangan desa yang efisien.

SUMMARY

The Effect of Capital Expenditure and the Allocation of Village Funds to the Independence and Financial Performance of the Village in Jember Regency; Dinna Tri Yulihantini, 150820101016; 2017; 88 pages; Master of Management Program Faculty of Economics and Business Universitas Jember.

This aims of study was to determine the Village Finance Performance of Jember Regency to support regional autonomy implementation. Village Financial Performance was a benchmark in assessing village accountability in providing better public services. Village Financial Performance could be know by measuring a financial ratios on Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). This study analyzed influence of Capital Expenditure and Village Fund Allocation (ADD) as a component in APBDes on Village Financial Performance in terms of Effectiveness and Efficiency of Village Financial Performance in Jember Regency. In addition, this study analyzed a role of Village Financial Independence in realizing the Effectiveness and Efficiency of Village Financial Performance.

The data used in this study was secondary data in the form of Realization Report of APBDes in 53 Villages in Jember Regency Budget Year 2015-2016. Analyzer used was Path Analysis. The results of this study indicated that Capital Expenditure and ADD hadn't effect on Village Financial Independence in Jember Regency. Capital Expenditure Budget and ADD hadn't play a role in creating Village Financial Independence. Capital Expenditure had a negative effect on the effectiveness of Village Financial Performance, implies that increased Capital Expenditure budget was not follow by the relative increase of revenue realization to the existing budget income. ADD hadn't significant effect on the effectiveness of Village Financial Performance, meaning that the delay of granting General Allocation Fund (DAU) as a source of ADD by the central government to the Government of Jember Regency hadn't affect the Effectiveness of Village Financial Performance in Jember Regency. Village Financial Performance

hadn't contribute to capital expenditures and ADD in realizing the effectiveness of Village Financial Performance.

Viewed from the Efficiency of Village Financial Performance, Capital Expenditure had a negative effect, this is due to the improper Capital Expenditure budget and poor management so that the bigger Capital Expenditure budgeted was not followed by the relative increase of expenditure realization to the expenditure budget. While ADD had a positive influence in determining the realization of expenditure on the village budget. The greater the ADD that each village receives, the efficiency of village Finance Performance will increase. Village financial independence hadn't affect capital expenditures and ADD creates efficient Village Financial Performance.

PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT. Atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul “Pengaruh Belanja Modal dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember”. Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan strata dua (S2) pada Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Penyusunan Tesis ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Dr. Hari Sukarno, M.M., selaku Dosen Pembimbing Utama dan Dr. Siti Maria Wardayati, M.Si, Ak, selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam membimbing penulisan tesis ini;
2. Segenap Dosen Pengajar dan Staf pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan bantuan selama penulis menempuh studi.
3. BPKP selaku pemberi beasiswa program STAR BPKP yang telah memberi dukungan dan kesempatan kepada penulis sehingga dapat melanjutkan studi jenjang S2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Bupati Jember, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Jember dan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk dapat melanjutkan studi ke jenjang S2 pada Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jember, Bagian Pemerintahan Desa dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember yang telah memberikan kesempatan kepada penulis melakukan penelitian ini.
6. Teman-teman STAR Batch 2 BPKP yang telah berjuang bersama dan semua pihak yang telah membantu hingga selesainya penulisan tesis ini.

Penulis juga menyadari bahwa penulisan Tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat.

Jember, Mei 2017

Penulis

Dinna Tri Yulihantini

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PEMBIMBINGAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
RINGKASAN/ <i>SUMMARY</i>	viii
PRAKATA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR,....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1. Kajian Teori	10
2.1.1 Keuangan Daerah	10
2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah	11
2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah.....	12
2.1.4 Belanja Modal	13
2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD).....	16
2.1.6 Keterkaitan Belanja Modal, Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa	17
2.1.7 Keterkaitan ADD, Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa	18
2.2 Penelitian Terdahulu	19
2.3 Kerangka Konseptual Penelitian.....	20
2.4 Pengembangan Hipotesis.....	21
2.4.1 Relasional Belanja Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa	21
2.4.2 Relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuanga Desa.....	22
2.4.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional Belanja Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa	22
2.4.4 Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa	23
2.4.5 Relasional Belanja Modal, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa	24

2.4.6	Relasional ADD, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa	25
2.4.7	Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah pada Relasional Belanja Modal, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa.....	26
2.4.8	Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa...	27
BAB 3.	METODE PENELITIAN	28
3.1	Rancangan Penelitian.....	28
3.2	Populasi dan Sampel.....	28
3.3	Jenis dan Sumber Data.....	29
3.4	Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel.....	29
3.5	Metode Analisis Data	30
BAB 4.	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	37
4.1	Hasil Penelitian.....	37
4.1.1	Gambaran Umum Kabupaten Jember.....	37
4.1.2	Kondisi Keuangan Daerah.....	38
4.2	Deskripsi Statistik Variabel Penelitian	41
4.2.1	Variabel Belanja Modal (BM).....	41
4.2.2	Variabel Alokasi Dana Desa (ADD)	42
4.2.3	Variabel Kemandirian Keuangan Desa (KKD).....	42
4.2.4	Variabel Efektifitas Kinerja Keuangan Desa (KKef).....	43
4.2.5	Variabel Efisiensi Kinerja Keuangan Desa (KKefi).....	44
4.3	Hasil Analisis Data	45
4.3.1	Analisis Jalur	45
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian.....	57
4.4.1	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan Desa	57
4.4.2	Pengaruh ADD Terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan Desa.....	59
4.4.3	Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasion Belanja Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa.....	60
4.4.4	Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa ...	61
4.4.5	Pengaruh Belanja Modal, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa	62
4.4.6	Pengaruh ADD, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa	63
4.4.7	Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional BM, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa	64
4.4.8	Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada relasional ADD, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa.....	65
BAB 5.	KESIMPULAN DAN SARAN	67
5.1	Kesimpulan	67
5.2	Implikasi Penelitian	67
5.3	Keterbatasan Penelitian	68
5.4	Saran	68

DAFTAR PUSTAKA	70
INDEKS ISTILAH	74
LAMPIRAN.....	75
AUTOBIOGRAFI.....	88

DAFTAR TABEL

	Halaman
1.1 Kontribusi Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011–2016.....	4
4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa di Kab. Jember	38
4.2 Deskripsi Statistik Belanja Modal Desa di Kab. Jember Tahun 2015-2016.	41
4.3 Realisasi ADD Kabupaten Jember Tahun 2015-2016	42
4.4 Rasio Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015-2016	43
4.5 Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015-2016	44
4.6 Rasio Efisiensi Kinerja Keuangan Desa Tingkat Desa di Kabupaten Jember Tahun 2015-2016	45
4.7 Hasil Korelasi antara Belanja Modal dan ADD	46
4.8 Hasil Pengujian Analisis Jalur Model Gambar 4.4.....	47
4.9 Hasil Pengujian Analisis Jalur model gambar 4.6.....	50
4.10 Hasil Pengujian Analisis Jalur Model Gambar 4.7.....	51
4.11 Hasil Pengujian Analisis Jalur Model Gambar 4.8.....	54
4.12 Hasil Pengujian Analisis Jalur Model Gambar 4.9.....	55

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Konseptual	20
3.1 Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	31
3.2 Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD terhadap KKD	32
3.3 Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD, KKD ke KKef.....	33
3.4 Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD, KKD ke KKef.....	34
4.1 Proporsi PAD Kabupaten Jember Tahun 2011-2016.....	39
4.2 Proporsi Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011-2016.....	40
4.3 Model Analisis Jalur (<i>Path Analysis</i>).....	46
4.4 Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, ADD ke KKD.....	47
4.5 Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, ADD ke KKD setelah <i>Trimming</i>	48
4.6 Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, ADD, KKD ke KKef.....	49
4.7 Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, ADD, KKD ke KKef setelah <i>Trimming</i>	51
4.8 Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, ADD, KKD ke KKefi.....	53
4.9 Diagram Jalur Hubungan Kausal dari BM, KKD ke KKefi setelah <i>Trimming</i>	55

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1.1 Realisasi Pendapatan Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015-2016.....	74
1.2 Realisasi Belanja Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2015-2016.....	75
2.1 Penelitian Terdahulu	76
4.1 Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2016.....	79
4.2 Deskripsi Statistik BM, ADD, KKD, KKef, KKefi Tahun 2015-2016	80
4.3 Korelasi Belanja Modal dengan ADD	81
4.4 Hasil Analisis Jalur terhadap Kemandirian.....	82
4.5 Hasil Analisis Jalur terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan.....	83
4.6 Hasil Analisis Jalur terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan setelah <i>Trimming</i>	84
4.7 Hasil Analisis Jalur terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah.....	85
4.8 Hasil Analisis Jalur terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah setelah <i>Trimming</i>	86



**PENGARUH BELANJA MODAL DAN ALOKASI DANA DESA
TERHADAP KEMANDIRIAN DAN KINERJA KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN JEMBER**

TESIS

Oleh

Dinna Tri Yulihantini
NIM 150820101016

**PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memasuki masa otonomi daerah dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 yang diperbarui oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Pasal 12 Undang-undang no 33 tahun 2004 menjelaskan bahwa penerapan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia tercermin dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik juga didasarkan atas azas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Salah satu perwujudan pelaksanaan azas desentralisasi adalah pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah di tingkat terkecil di Indonesia adalah desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah melalui Undang-Undang ini memberi peluang bagi desa untuk menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan dan memberdayakan masyarakat desa agar lebih mandiri dan otonom. Otonomi desa dimaksud adalah otonomi pemerintah desa dalam rangka pengelolaan keuangan desa. Peluang perubahan ini tidak lepas dari peran kepala desa yang mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

Kepala desa harus mempunyai kecakapan yang tinggi agar pengelolaan dan pengalokasian keuangan desa dilakukan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan desa. Perencanaan strategis sangat penting karena dengan perencanaan akan terlihat jelas peran kepala desa dalam mengkoordinasikan semua unit kerjanya. Potensi suatu desa tidak akan optimal pemanfaatannya bila kepala desa tidak mengetahui bagaimana cara mengelolanya. Potensi desa yang

kurang dengan strategi yang tepat dalam memanfaatkan bantuan dari pusat dan memberdayakan daerahnya akan semakin meningkatkan kemampuan sumber daya manusia yang ada.

Penundaan pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mengakibatkan berkurangnya sumber dana bagi pembangunan pemerintah daerah. Penundaan juga akan mempengaruhi pendapatan di tingkat desa karena sebagian besar pendapatan desa berasal dari bantuan pemerintah pusat. Kepala desa dituntut untuk berfikir kreatif dalam memilih skala prioritas yang diambil guna menyalahi berkurangnya sumber dana tersebut. Kepala desa perlu melakukan penghematan dalam perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desanya (APBDes) serta terus mencari sumber dana lain dari pendapatan asli desa untuk meningkatkan kemandirian daerahnya. Pemerintah Desa selama ini cenderung bergantung pada dana yang dikucurkan dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga dikhawatirkan dengan adanya penundaan ini akan mempengaruhi pembangunan yang dilaksanakan di tingkat desa.

Penerapan otonomi desa seutuhnya membawa konsekuensi logis berupa pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa berdasarkan manajemen keuangan yang sehat. Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan dapat lebih meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, prosedur penatausahaan dan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Tujuan pembangunan yang dilaksanakan dengan manajemen yang sehat diharapkan dapat mempermudah tercapainya tujuan pembangunan desa serta mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan terhadap daerah dan memberi peluang untuk koordinasi tingkat lokal (Bastian, 2001:52). Penerapan manajemen yang sehat akan mewujudkan kinerja yang baik.

Penelitian Widodo (dalam Halim 2014:L2) menyatakan bahwa salah satu alat ukur yang dapat digunakan dalam menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Analisis terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah merupakan

informasi yang penting untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah. Kinerja keuangan digunakan untuk menilai keberhasilan pemerintah daerah mengelola keuangannya serta memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Analisis kinerja keuangan pada APBD dilakukan dengan cara membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Di tingkat pemerintah desa analisis kinerja keuangan dapat dilakukan dengan analisis rasio keuangan terhadap APBDes, dengan cara ini keberhasilan kinerja keuangan desa dapat tercapai.

Widodo (dalam Halim 2014:L2) mengatakan bahwa hasil analisis rasio keuangan dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah, mengukur efektifitas, efisiensi dan aktifitas pemerintah daerah dalam merealisasikan dan membelanjakan pendapatan daerah serta mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan daerah. Selain itu rasio keuangan daerah digunakan untuk melihat pertumbuhan dan perkembangan pendapatan dan pengeluaran selama periode waktu tertentu.

Pengukuran kinerja keuangan penting dilakukan karena dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas daerah dalam pelayanan publik yang lebih baik, bukan sekedar kemampuan yang menunjukkan bahwa uang publik tersebut telah dibelanjakan tetapi uang publik telah dibelanjakan secara efektif dan efisien. Sejak diberlakukan kebijakan otonomi daerah oleh pemerintahan pusat, bukan saja pemerintah daerah yang memiliki tugas memberikan suatu inovasi dalam sistem pemerintahan kearah yang lebih baik serta lebih mandiri dalam mengelola dan meningkatkan kinerja keuangan pemerintahannya tetapi pemerintah di tingkat desa mengemban tugas yang sama sesuai dengan kewenangan desa. Perubahan tersebut menuntut pemerintah Kabupaten Jember dari tingkat kabupaten hingga desa untuk dapat menerapkan pemerintah yang berorientasi kepada pencapaian hasil serta pertanggungjawaban menuju *good governance*, sehingga akan terwujud pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan bertanggungjawab.

Kinerja keuangan pemerintah Kabupaten Jember dapat diketahui dengan mengukur rasio keuangan daerah. Salah satu komponen yang diukur adalah

instrumen kebijakan fiskal dalam penerimaan daerah. Kabupaten Jember memiliki kapasitas fiskal yang baik dengan memiliki kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap penerimaan daerah. Peningkatan kontribusi PAD dan penurunan kontribusi dana perimbangan mengindikasikan bahwa terjadi perubahan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang lebih besar bersumber dari dana perimbangan daripada kekuatan pendapatan sendiri. Pertumbuhan penerimaan merupakan hal yang sangat penting dalam pendapatan daerah. Kontribusi penerimaan Kabupaten Jember dijelaskan pada Tabel 1.1

Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2011 – 2016

Tahun	Total Penerimaan	PAD		Dana Perimbangan		Lain-lain Pendapatan yg sah		Total
		Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi	Realisasi	Kontribusi	
2011	1.882.283.782.606,79	182.494.390.158,79	9,70%	1.250.834.951.524	66,45%	448.954.440.924	23,85%	100%
2012	2.146.090.218.860,72	255.804.775.083,72	11,92%	1.484.110.400.708	69,15%	406.175.043.069	18,93%	100%
2013	2.366.370.839.531,68	308.376.581.785,68	13,03%	1.588.896.753.256	67,14%	469.097.504.490	19,82%	100%
2014	2.797.468.559.469,69	440.462.012.490,69	15,75%	1.746.847.365.217	62,44%	610.159.181.762	21,81%	100%
2015	3.116.544.378.910,93	461.882.363.146,93	14,82%	1.917.759.331.546	61,53%	736.902.684.218	23,64%	100%
2016	3.192.013.632.804,96	524.955.111.848,96	16,45%	2.278.556.031.155	71,38%	388.502.489.801	12,17%	100%
	Rata-rata		13,61%		66,35%		20,04%	100%

Sumber : Lampiran 1.1

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa desentralisasi fiskal membawa dampak pada penerimaan Kabupaten Jember. Penyumbang penerimaan terbesar Kabupaten Jember pada tahun 2011-2016 berasal dari dana perimbangan kemudian lain-lain pendapatan yang sah dan yang terkecil PAD. Kontribusi dana perimbangan mengalami fluktuasi di tahun 2011 sebesar 66,45% menjadi 61,53% di tahun 2015 tetapi di tahun 2016 kembali naik menjadi 71,38% dikarenakan banyaknya kebutuhan biaya untuk kegiatan pembangunan yang tidak diimbangi penerimaan daerah yang memadai. Kontribusi PAD cenderung mengalami peningkatan. Kontribusi PAD terhadap total penerimaan Kabupaten Jember tahun 2011 sebesar 9,70% selanjutnya meningkat pada tahun 2016 sebesar 16,45%. Kontribusi lain-lain pendapatan yang sah pada tahun 2011 sebesar 23,85% mengalami fluktuasi dan tahun 2016 menjadi 12,17% di tahun 2016 (BPKAD Kab. Jember, 2016).

Peningkatan kontribusi PAD dan lain-lain pendapatan yang sah serta menurunnya kontribusi dana perimbangan mengindikasikan bahwa terjadi perubahan kemampuan daerah dalam memperoleh pendapatan yang awalnya berasal dari dana perimbangan beralih kepada kekuatan pendapatan sendiri dengan kata lain kemandirian Kabupaten Jember mengalami peningkatan.

Pengalokasian belanja daerah perlu dipertimbangkan setelah mengetahui penerimaan daerah. Struktur anggaran dan pengelolaan keuangan daerah yang tepat diperlukan dalam rangka mempertimbangkan belanja daerah tersebut untuk menentukan baik tidaknya pengelolaan keuangan daerah. Alokasi anggaran belanja daerah harus diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara lebih efisien dan efektif serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat di Kabupaten Jember. Tujuan tersebut bisa dilaksanakan jika anggaran belanja setiap kegiatan sudah efisien, tepat sasaran, wajar, tidak *underfinancing* (kurang) atau *overfinancing* (berlebih).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan sesuai dengan prioritas pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Anggaran Kabupaten Jember yang terbatas akan berdampak pada penentuan skala prioritas pada sektor wajib daripada pilihan serta antara alokasi belanja yang dirasakan manfaatnya secara langsung dan tidak langsung oleh masyarakat. Wakil ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jember menyatakan penundaan pemberian dana perimbangan dari pemerintah pusat akan mempengaruhi jumlah Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima untuk pembangunan Kabupaten Jember. Data Kementerian Keuangan menyatakan bahwa Kabupaten Jember mengalami penundaan DAU tertinggi di antara kabupaten dan kota lain di Jawa Timur sebesar Rp. 247 milyar pada periode September – Desember 2016 karena serapan anggaran kabupaten yang masih rendah yaitu 43,93 % (Wirawan, 2016).

Bupati dan DPRD Kabupaten Jember sudah menyiapkan rancangan program prioritas jika anggaran tersebut benar-benar tidak turun agar tidak mengganggu pembangunan di segala sektor (Kosasi, 2016). Pertimbangan pengutamakan tersebut didasarkan kepada visi dan misi pemerintah daerah yang

salah satu prioritasnya antara lain mengutamakan pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan di daerah/desa. Sejalan dengan program Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 menyatakan pemberian ADD diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian desa dan meningkatkan partisipasi masyarakat desa. Sumber dana ADD berasal dari DAU dimana pada tahun 2016 mengalami penundaan dari pemerintah pusat. Pengurangan DAU yang berdampak pada pengurangan ADD akan mempengaruhi kinerja keuangan daerah khususnya di desa. Prasetyanto (2012) mengatakan bahwa peningkatan pemberian ADD dapat meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah dan Asni (2013) menemukan bahwa ADD mampu menjadi instrumen dalam mendukung kemandirian desa.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Jenis alokasi belanja modal dalam belanja desa terdapat pada setiap program kegiatan yang tertuang dalam APBDes dengan komposisi terbesar daripada jenis belanja lainnya (Abidin, 2015). Hal ini menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai peran penting dalam keberhasilan pembangunan desa karena dilakukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan ekonomi desa.

Belanja modal merupakan belanja daerah yang diasumsikan akan membawa *multiplier effect* bagi perekonomian suatu masyarakat dengan cara membangun jalan, jembatan, gedung, irigasi dan sebagainya (Halim, 2014:234).. Pembangunan infrastruktur dalam rangka meningkatkan layanan kepada masyarakat diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah berusaha meningkatkan realisasi belanja modal agar pembangunan sarana dan prasarana dapat terwujud dan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan daerahnya. Peran belanja modal sangat penting dalam mewujudkan kinerja keuangan daerah dapat ditunjukkan dengan penyerapan anggaran belanja modal yang maksimal. Hasil

penelitian Puspitasari (2015) menunjukkan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan sedangkan penelitian Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Penelitian Darwis (2015) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap kemandirian keuangan daerah.

Kemampuan pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam APBDes yang menggambarkan kemampuan pemerintah desa dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan serta pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa. Dalam menjalankan otonomi daerah, pemerintah desa dituntut untuk menjalankan pemerintahan secara efisien dan efektif, mampu mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan, serta meningkatkan pemerataan dan keadilan dengan mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah tidak lepas dari kemampuan dalam merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan desa sehingga dapat meningkatkan kemandirian desa.

Berdasarkan *research gap* dan fenomena yang terjadi di Kabupaten Jember maka perlu pengkajian lebih lanjut untuk mengetahui apakah belanja modal dan ADD berpengaruh terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka rumusan masalah penelitian ini adalah

- a. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember ?
- b. Apakah ADD berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember?

- c. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember?
- d. Apakah ADD berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember?
- e. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember?
- f. Apakah belanja modal berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember?
- g. Apakah ADD berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember?
- h. Apakah kemandirian keuangan daerah berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember?

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung belanja modal terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember.
- b. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung ADD terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember.
- c. Untuk mengkaji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung belanja modal terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.
- d. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung ADD terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.
- e. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung kemandirian keuangan daerah terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.
- f. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.

- g. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung ADD terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.
- h. Untuk menguji dan menganalisis besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung kemandirian keuangan daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat antara lain:

- a. Manfaat praktis
 - 1) Bagi pemerintah Kabupaten Jember, penelitian ini dapat memberi masukan dan saran dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan fungsi pengawasan terhadap pemerintah desa dalam penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap APBDes di masa-masa mendatang.
 - 2) Bagi pemerintah pusat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan saran dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keuangan desa.
- b. Manfaat teoritis
 - 1) Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi saat mengadakan penelitian di bidang keuangan daerah khususnya di tingkat desa.
 - 2) Ilmu pengetahuan, penelitian ini dapat memperkaya ilmu pengetahuan bagi pengembangan terutama yang berkaitan dengan keuangan daerah di Indonesia.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Penelitian ini menggunakan *grand theory* tentang keuangan daerah yang secara sederhana dapat diartikan sebagai semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki/dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak- pihak lain sesuai dengan ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku (Mamesah, 1995:16). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan daerah tersebut.

Secara khusus keuangan desa dijabarkan pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Salah satu keuangan desa yang dikelola langsung oleh pemerintah desa adalah APBDes. Pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan memerlukan sumber dana/modal untuk membiayai pengeluaran pemerintah tersebut (*government expenditure*) terhadap barang-barang publik (*public goods*) dan jasa pelayanannya. Tanpa adanya sumber keuangan yang memadai dalam membiayai pelaksanaan pembangunan daerahnya maka tugas dan wewenang pemerintah desa tidak dapat terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah desa memerlukan sumber dana yang memadai.

Sumber pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa (PADes), dana tranfer dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan desa kemudian dibelanjakan sesuai rencana belanja desa yang tertuang pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

2.1.2 Kinerja Keuangan Daerah

Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Pengukuran kinerja dan indikator merupakan bagian dari proses manajemen strategis (Jackson and Palmer, 1992). Oleh karena itu, sebagai suatu elemen manajerial, kinerja merupakan kunci sukses. Keputusan strategis disusun melalui kebijakan untuk mencapai sasaran dan target yang diinginkan. Pencapaian sasaran dan target membutuhkan informasi aktual tentang kinerja yang diharapkan dengan membandingkan kebijakan yang ditetapkan (*setting objectives*). Informasi yang diharapkan harus tersusun dan merupakan desain pengukuran kinerja dan indikator yang terurai dengan jelas.

Bastian (2010:274) mendefinisikan kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja di masa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Menurut Raharjo (2011), tolak ukur kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap program dan kegiatan. Tolak ukur kinerja digunakan sebagai dasar pengukuran kinerja keuangan dalam sistem anggaran kinerja, terutama dalam menilai kewajaran anggaran biaya suatu program atau kegiatan.

Pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah dilakukan untuk memenuhi tiga tujuan (Mardiasmo, 2009:121) yaitu memperbaiki kinerja pemerintah, membantu mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan dan mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan. Pelaksanaan otonomi daerah tentunya tidak mudah, karena menyangkut masalah kemampuan daerah itu sendiri dalam membiayai penyelenggaraan urusan pemerintahan beserta pelaksanaan pembangunan dalam

upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, masalah kemampuan daerah berarti menyangkut masalah bagaimana daerah dapat memperoleh dan meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk menjalankan pemerintahannya.

Kinerja keuangan daerah dapat ditinjau dari beberapa aspek antara efektivitas kinerja keuangan desa dan efisiensi kinerja keuangan desa. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Sedangkan efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efektivitas menekankan pada hasil yang dicapai, sedangkan efisiensi lebih melihat pada bagaimana cara mencapai hasil dengan membandingkan antara input dan output (Siagian, 2001:24). Pengertian efektifitas menurut Mardiasmo (2007:134) adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya.

Utama (2008) menjelaskan bahwa rasio efektifitas keuangan daerah dapat dilihat dari tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Sedangkan rasio efisiensi keuangan daerah merupakan tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja. Efektivitas dan efisiensi kinerja keuangan daerah merupakan tercapainya tujuan pengelolaan keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan daerahnya melalui APBD yang diukur dengan rasio efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan.

2.1.3 Kemandirian Keuangan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, kemandirian keuangan daerah berarti pemerintah dapat melakukan pembiayaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri, dalam rangka asas desentralisasi. Pengertian kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2012:232) adalah kemampuan pemerintah

daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Menurut Utama (2008) kemandirian keuangan daerah sendiri ditentukan oleh besar kecilnya PAD dibandingkan dengan anggaran pendapatan daerah.

Pemerintah daerah dituntut untuk selalu meningkatkan kemandirian keuangan daerahnya agar ketergantungan dengan pemerintah pusat dapat dikurangi. Daerah yang mempunyai kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri dengan mengandalkan PAD memiliki tingkat ketergantungan yang semakin kecil pada pemerintah pusat berarti pula tingkat kemandirian daerah tersebut semakin tinggi. Peningkatan kemandirian keuangan daerah dapat memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengolah sumber daya keuangan daerah secara maksimal sehingga dapat membiayai sendiri pelaksanaan kegiatan pembangunan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

2.1.4 Belanja Modal

Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 menjelaskan bahwa belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai manfaat melebihi 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja modal menurut PMK no. 91/PMK.06/2007 merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014, belanja modal dalam APBDes merupakan belanja desa yang dikategorikan berdasarkan jenisnya yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang

atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan pengertian belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk didalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah masa manfaat serta meningkatkan kapasitas dan kualitas aset. Kriteria kapitalisasi dalam pengadaan/pemeliharaan barang/aset merupakan suatu tahap validasi untuk penetapan belanja modal atau bukan dan merupakan syarat wajib dalam penetapan kapitalisasi atas pengadaan barang/aset (Permenkeu nomor 101/PMK.02/2011) :

- a. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya aset dan/atau bertambahnya masa manfaat/umur ekonomis aset berkenaan.
- b. Pengeluaran anggaran belanja tersebut mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja, atau volume aset.
- c. Memenuhi nilai minimum kapitalisasi dengan rincian sebagai berikut:
 - 1) Untuk pengadaan peralatan dan mesin, batas minimal harga pasar per unit barang adalah sebesar Rp 300.000,-
 - 2) Untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan gedung dan bangunan per paket pekerjaan adalah sebesar Rp 10.000.000,-
- d. Pengadaan barang tersebut tidak dimaksudkan untuk diserahkan/dipasarkan kepada masyarakat atau entitas lain di luar pemerintah.

Berdasarkan Lampiran III Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011 tentang Klasifikasi Anggaran Belanja Modal dipergunakan untuk antara lain :

- a. Belanja Modal Tanah

Seluruh pengeluaran untuk pengadaan/pembelian/pembebasan/ penyelesaian, balik nama, pengosongan, penimbunan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat tanah serta pengeluaran-pengeluaran lain yang bersifat administratif sehubungan dengan perolehan

hak dan kewajiban atas tanah pada saat pembebasan/pembayaran ganti rugi sampai tanah tersebut siap digunakan/dipakai.

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Pengeluaran untuk pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Pengeluaran untuk memperoleh gedung dan bangunan secara kontraktual sampai dengan gedung dan bangunan siap digunakan meliputi biaya pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak (kontraktual). Dalam belanja ini termasuk biaya untuk perencanaan dan pengawasan yang terkait dengan perolehan gedung dan bangunan.

d. Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Pengeluaran untuk memperoleh jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan sampai siap pakai meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai. Dalam belanja ini termasuk biaya untuk penambahan dan penggantian yang meningkatkan masa manfaat, menambah nilai aset, dan di atas batas minimal nilai kapitalisasi jalan dan jembatan, irigasi dan jaringan.

e. Belanja Modal Lainnya

Pengeluaran yang diperlukan dalam kegiatan pembentukan modal untuk pengadaan/pembangunan belanja modal lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan dalam perkiraan kriteria belanja modal Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jaringan (Jalan, Irigasi dan lain-lain). Termasuk dalam belanja modal ini: kontrak sewa beli (*leasehold*), pengadaan/pembelian barang-barang kesenian (*art pieces*), barang-barang purbakala dan barang-barang untuk museum, serta hewan ternak, buku-buku dan jurnal ilmiah sepanjang tidak dimaksudkan untuk dijual dan

diserahkan kepada masyarakat. Termasuk dalam belanja modal ini adalah belanja modal non fisik yang besaran jumlah kuantitasnya dapat teridentifikasi dan terukur.

f. Belanja Modal Badan Layanan Umum (BLU)

Pengeluaran untuk pengadaan/perolehan/pembelian aset yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan operasional BLU.

2.1.5 Alokasi Dana Desa (ADD)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pasal 18 menyatakan bahwa ADD berasal dari APBD Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10%. Pemberian ADD ini merupakan perwujudan dari pemenuhan hak desa dalam menyelenggarakan otonomi desa agar dapat berkembang mengikuti pertumbuhan desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat desa. ADD juga dapat mewujudkan layanan bagi masyarakat walaupun terbatas pada wilayah desa (Menkhoff et.al, 2011). Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007 menjelaskan tujuan pemberian ADD adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 20 pengelolaan ADD menganut azas :

- a. Azas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM);
- b. Azas adil adalah besarnya bagian ADD berdasarkan Nilai Bobot Desa (BD_x) yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, (misalnya kemiskinan, keterjangkauan, pendidikan dasar, kesehatan dll) selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP). Besarnya prosentase perbandingan antara azas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas adalah besarnya ADDM adalah 60% (enam puluh persen) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh persen) dari jumlah ADD.

2.1.6 Keterkaitan Belanja Modal, Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa.

Belanja yang bertujuan untuk menambah kekayaan/aset daerah dan penganggarnya membutuhkan dana besar sesuai syarat wajib kapitalisasi dalam pengadaan belanja modal dalam penjelasan tentang klasifikasi jenis belanja peraturan pemerintah nomor 101/PMK.02/2011. Beberapa bentuk belanja modal seperti belanja modal gedung, jalan, irigasi dan jaringan yang tertuang dalam pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ditujukan untuk memenuhi fasilitas pelayanan bagi masyarakat.

Desa yang mempunyai kemampuan dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakatnya sendiri dengan mengandalkan PADes memiliki tingkat ketergantungan yang semakin kecil pada pemerintah pusat berarti pula tingkat kemandirian desa tersebut semakin tinggi.. Hal ini sesuai dengan pengertian kemandirian keuangan daerah yang dikemukakan oleh Halim (2012:232) yaitu kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dari sumber pendapatan daerahnya.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011 menyatakan bahwa indikator keberhasilan kinerja keuangan dapat dilihat dari tingkat

penyerapan anggaran. Serapan anggaran yang maksimal menunjukkan keberhasilan kinerja keuangannya. Belanja modal yang setiap tahun dijabarkan dalam APBD seharusnya dapat direalisasikan dengan maksimal sehingga dapat memenuhi kebutuhan masyarakat khususnya dalam pemenuhan fasilitas umum sesuai dengan penjelasan Halim (2014:230) tentang belanja modal. Infrastruktur yang baik membuat roda perekonomian semakin maju, PAD dapat ditingkatkan dan akan tercipta kemandirian daerah.

2.1.7 Keterkaitan ADD, Kemandirian dan Kinerja Keuangan Desa.

Pengelolaan ADD yang baik akan berguna bagi pertumbuhan pembangunan di desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 pasal 19 ADD adalah salah satu anggaran dalam APBD yang bertujuan untuk pemerataan pembangunan di wilayah khususnya desa dan memberdayakan masyarakat desa. Pengelolaan ADD merupakan kesatuan dengan keuangan desa. Pengelolaan ADD yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan desa yang baik pula.

Salah satu tujuan pemberian ADD untuk meningkatkan infrastruktur perdesaan. Implementasi ADD yang baik akan meningkatkan layanan pada masyarakat desa sehingga roda perekonomian desa semakin maju. Pergerakan ekonomi desa diharapkan dapat menggali potensi yang dimiliki desa dan meningkatkan pendapatan desa. Kemampuan desa dalam merencanakan, menggali, mengelola dan menggunakan keuangannya akan menentukan tingkat kemandirian desa.

Kinerja keuangan desa dapat diukur melalui efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa. Pemberian ADD diharapkan dapat membantu pemerintah desa membiayai pembangunannya sehingga tujuan pembangunan desa dapat terwujud dan dapat meningkatkan pendapatan desa sehingga mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Belanja desa yang dianggarkan dalam APBDes dapat merealisasikan tujuan ADD. Serapan yang tinggi terhadap belanja desa menandakan tingkat efisiensi belanja desa yang optimal.

2.2 Penelitian Terdahulu

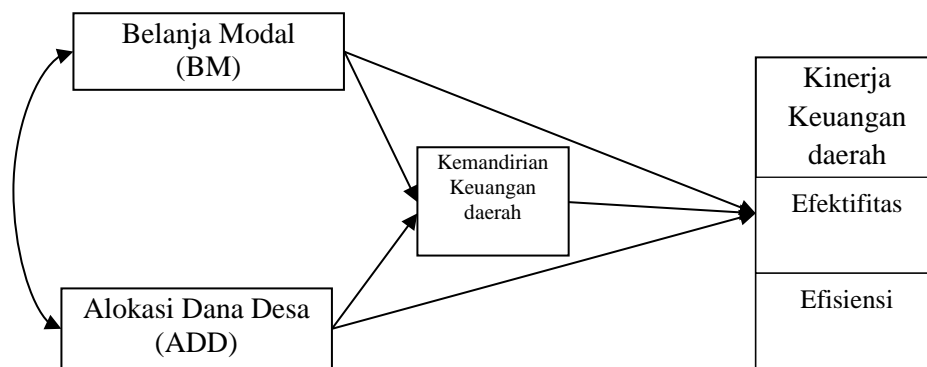
Berbagai studi empiris yang dilakukan peneliti sebelumnya mengenai pengaruh belanja modal dan ADD terhadap kinerja keuangan daerah telah banyak memberikan gambaran dalam penelitian ini. Penelitian Nugroho (2012) tentang pengaruh belanja modal terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah dengan PAD sebagai variabel *intervening* menemukan belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung sedangkan secara tidak langsung belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan melalui PAD sebagai variabel *intervening*. Berbeda dengan penelitian Nugroho (2012), Mone (2012) membuktikan bahwa belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Secara parsial belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) membuktikan bahwa belanja modal secara signifikan mempengaruhi pertumbuhan kinerja keuangan.

Kajian tentang efektifitas pemberian dana dari pemerintah pusat untuk daerah (*decentralization fiscal*) khususnya ADD yang menggunakan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya dimana terdapat beberapa perbedaan hasil temuan seperti penelitian yang dilakukan Prasetyanto (2012) menemukan bahwa ADD mampu meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah, mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan produk domestik regional bruto sektor pertanian. Penelitian Asni (2015) yang menemukan bahwa program ADD dapat menjadi instrumen dalam mendukung kemandirian desa.

Thomas (2013) meneliti Pengelolaan ADD Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Hasil kajiannya menunjukkan 30% dari ADD bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya kurang optimal. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan ADD. Ringkasan penelitian terdahulu dapat dilihat pada Lampiran 2.1.

2.3 Kerangka Konseptual Penelitian

Adanya penundaan DAU yang dilakukan pemerintah pusat akan mempengaruhi pendapatan daerah. Kondisi ini menuntut pemerintah Kabupaten Jember di tingkat desa merevisi anggaran yang ada dan mengkaji ulang peringkat skala prioritas yang perlu diutamakan dengan tetap berusaha meningkatkan PAD untuk memperoleh sumber dana lain. Penentuan skala prioritas alokasi sumberdaya ke dalam belanja desa akan menentukan keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Salah satu pengalokasian sumberdaya yang menjadi prioritas adalah belanja langsung yang didalamnya terdapat anggaran belanja modal dan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum desa. Disamping itu ADD yang akan disalurkan pada pemerintahan desa akan berpengaruh dengan adanya penundaan DAU karena sumber ADD berasal dari DAU. Berdasarkan uraian latar belakang, tinjauan pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.1.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 menjelaskan bahwa belanja modal (BM) sebagai bagian dari komponen belanja desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu sumber pendapatan dalam APBDes mempunyai peran penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan. Analisis kinerja keuangan melalui rasio efektifitas dan efisiensi terhadap APBDes menunjukkan adanya pengaruh belanja modal dan ADD terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa.

Kemandirian keuangan desa merupakan kemampuan desa dalam membiayai belanjanya. Daerah yang mampu membiayai belanja daerahnya dari PAD dapat dikategorikan daerah yang sudah mandiri (Halim 2012:232). Kemandirian suatu desa diasumsikan akan mempermudah pengelolaan APBDes dalam mewujudkan efektifitas dan efisiensi keuangan desanya.

2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Relasional Belanja Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Penjelasan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud efektif adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil. Bastian (2010:274) mendefinisikan kinerja keuangan adalah gambaran pencapaian pelaksanaan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi. Kinerja keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan.

Efektivitas kinerja keuangan desa adalah tercapainya tujuan kinerja keuangan daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban, dan pengawasan yang dilaksanakan pemerintah desa dalam melaksanakan kegiatan daerahnya melalui APBDes yang diukur dengan rasio efektifitas kinerja keuangan. Belanja modal merupakan komponen APBDes yang mempunyai komposisi besar dan diasumsikan mempunyai *multiplier effect* bagi pembangunan desa. Belanja modal akan mempengaruhi tingkat efektifitas kinerja keuangan desa. Penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) membuktikan bahwa belanja modal berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 1: Belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas kinerja keuangan desa.

2.4.2 Relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Pengukuran efektivitas kinerja keuangan menurut Utama (2008) dapat dilakukan dengan menghitung tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang diukur dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan anggaran pendapatan. Mardiasmo (2007:134) menyimpulkan efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Salah satu alokasi anggaran yang bertujuan untuk peningkatan aspek pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik dalam rangka memberdayakan masyarakat desa dan perbaikan taraf hidupnya adalah ADD.

Pengelolaan ADD sangat bergantung pada perencanaan, pelaksanaan dan partisipasi masyarakat desa itu sendiri. Pengelolaan ADD yang baik, akan memberi manfaat yang dapat dirasakan dan dinikmati masyarakat di desa serta perekonomian desa akan tumbuh dengan baik. Efektifitas kinerja keuangan dapat dilihat dari realisasi ADD yang maksimal dan dapat meningkatkan pendapatan desa. Semakin besar realisasi pendapatan dibandingkan anggaran pendapatan yang ditetapkan desa, semakin tinggi efektifitas kinerja keuangan desanya.

Penelitian yang mendukung adanya pengaruh ADD terhadap perekonomian daerah yaitu Prasetyanto (2012) yang menemukan bahwa ADD berpengaruh juga terhadap kinerja keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut :

Hipotesis 2 : ADD berpengaruh secara parsial terhadap efektifitas kinerja keuangan desa

2.4.3 Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional Belanja Modal, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 menjelaskan bahwa belanja desa yang digunakan untuk pengeluaran dalam rangka pembelian/pengadaan barang atau bangunan yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan desa. Sebagian besar tujuan alokasi belanja desa untuk memberikan pelayanan yang baik untuk masyarakat desa. Belanja modal desa membutuhkan anggaran

yang tidak sedikit (Permenkeu Nomor 101/PMK.02/2011). Apabila suatu desa tidak dapat membiayai belanjanya sendiri akan dibantu dari pemerintah pusat berupa dana perimbangan (UU Nomor 33 Tahun 2004). Semakin kecil ketergantungan pemerintah desa terhadap dana tranfer baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berarti semakin mandiri desa tersebut dalam membiayai pembangunannya.

Kemandirian keuangan desa berkaitan dengan realisasi PADes terhadap anggaran pendapatan desa. Penyerapan belanja modal yang baik akan membantu pemerintah desa meningkatkan PADes sehingga kemandirian keuangan desa dapat terwujud. Kemandirian keuangan desa menandakan pengelolaan yang baik pada keuangan, artinya kinerja keuangan desa semakin optimal.

Hal ini didukung dengan penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) yang menemukan bahwa secara umum alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan penelitian Darwis (2015) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 3 : Kemandirian keuangan desa berpengaruh terhadap relasional belanja modal dan efektifitas kinerja keuangan desa

2.4.4 Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional ADD, Efektifitas Kinerja Keuangan Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa menjelaskan bahwa sumber ADD berasal dari dana perimbangan yang diperoleh dari APBN. Tujuan ADD untuk mendukung program nasional dalam mengurangi kemiskinan di daerah khususnya di wilayah pedesaan. Pemerintah pusat akan memberi bantuan dana (dana perimbangan) untuk membantu pemerintah daerah mewujudkan program nasional. Dana perimbangan yang diberikan kepada masing-masing daerah berbeda tergantung kemampuan pemerintah daerah menghasilkan PAD dan keberhasilan daerah dalam penyerapan anggarannya.

Pengelolaan ADD yang baik menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan keuangan desa. Realisasi ADD diharapkan membantu pemerintah desa menggerakkan perekonomian desa, menggali potensi kekayaan desa sehingga mengurangi ketergantungan dari pemerintah pusat maupun daerah. Kemandirian keuangan desa akan berperan menciptakan kinerja keuangan desa yang efektif.

Hal ini didukung dengan penelitian Asni (2013) yang menemukan bahwa dengan adanya ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:

Hipotesis 4 : Kemandirian keuangan desa berpengaruh terhadap relasional ADD dan efektifitas kinerja keuangan desa.

2.4.5 Relasional Belanja Modal dan Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Efisien menurut penjelasan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Efisiensi lebih melihat cara mencapai tujuan dengan membandingkan antara input dan outputnya (Siagaan, 2001:24). Salah satu komponen APBD adalah belanja yang bersifat menambah kekayaan daerah atau belanja modal bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik akan sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah desa.

Belanja modal yang besar merupakan pencerminan dari banyaknya infrastruktur dan sarana prasarana yang akan dibangun. Semakin besar belanja modal dalam anggaran pembangunan yang dilaksanakan maka hasil yang akan dicapai semakin besar. Hasil yang semakin besar berarti pula realisasi anggaran yang semakin tinggi. Perbandingan antara realisasi pengeluaran dan alokasi penganggaran dengan menggunakan ukuran efisiensi ini maka penilaian kinerja

dapat ditentukan. Penyerapan anggaran yang rendah mengakibatkan kurang efisiensi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan (Mihaiu, 2013).

Penelitian Puspitasari (2015) dan Sukarni (2016) menemukan bahwa belanja modal mempengaruhi kinerja keuangan. Sedangkan penelitian Nugroho (2012) menemukan bahwa belanja modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 5 : Belanja modal berpengaruh secara parsial terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.

2.4.6 Relasional ADD dan Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Efisiensi kinerja keuangan daerah dapat diukur melalui rasio efisiensi yaitu tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau prestasi yang dicapai oleh pemerintah daerah yang diukur dengan membandingkan realisasi belanja dengan anggaran belanja (Utama, 2008). Penjelasan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang dimaksud efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu. Pasal 19 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tujuan pemberian ADD adalah meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat.

Perencanaan program ADD diharapkan berdampak pada realisasi belanja desa yang dianggarkan dalam APBDes. Semakin besar ADD yang diberikan pemerintah daerah kepada pemerintah desa akan meningkatkan efisiensi kinerja keuangan desa. Manfaat yang dirasakan masyarakat desa dari pengelolaan ADD membuktikan kinerja keuangan desa yang baik sehingga dapat dikatakan tujuan pembangunan desa akan tercapai apabila pelaksanaan program ADD berjalan optimal.

Penelitian Prasetyanto (2012) tentang pengaruh ADD terhadap perekonomian daerah menemukan bahwa ADD berpengaruh juga terhadap kinerja

keuangan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 6 : ADD berpengaruh secara parsial terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.

2.4.7 Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional BM, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Kemandirian keuangan daerah menurut Halim (2012:232) adalah kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah dapat diukur dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan yang diperoleh suatu daerah (Utama, 2008). Desa yang mampu membiayai belanjanya sendiri dapat dikatakan desa yang sudah mandiri. Kemandirian keuangan desa akan membantu APBDes merealisasikan belanja modal sesuai dengan program kegiatan pembangunan desa yang telah dicita-citakan.

Belanja modal merupakan komponen belanja daerah yang mempunyai syarat minimum kapitalisasi yang harus dipenuhi. Anggaran belanja daerah ini mengakibatkan bertambahnya kapasitas, peningkatan standar kinerja atau volume aset (Permenkeu Nomor 101/PMK.02/2011). Belanja modal membutuhkan anggaran yang besar tetapi apabila alokasi anggarannya berkurang akan mempengaruhi output yang akan dihasilkan. Realisasi belanja modal akan menentukan tingkat efisiensi kinerja keuangan desa.

Penelitian yang mendukung yaitu Darwis (2015) membuktikan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh signifikan positif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 7: Kemandirian keuangan desa berpengaruh terhadap relasional belanja modal dan efisiensi kinerja keuangan desa.

2.4.8 Pengaruh Kemandirian Keuangan Desa pada Relasional ADD, Efisiensi Kinerja Keuangan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 menjelaskan salah satu tujuan pemberian ADD meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat. Pendapatan desa sangat menentukan kemandirian keuangan desa. Desa yang mampu membiayai pembangunannya sendiri dengan mengandalkan pendapatannya dikategorikan desa mandiri. Pelaksanaan program ADD yang optimal akan menjadi instrumen pendukung kemandirian keuangan daerah (Asni, 2013).

Kemandirian keuangan desa mencerminkan pengelolaan program ADD yang optimal. Pengelolaan program alokasi dana yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban yang baik akan menghasilkan *output* yang baik sehingga tujuan pembangunan desa terwujud. Keberhasilan pelaksanaan ADD ditandai dengan realisasi belanja desa yang optimal membuktikan bahwa kinerja keuangan desa yang efisien.

Penelitian Asni (2013) menemukan bahwa dengan adanya program ADD dapat menjadi instrumen pendukung dalam mewujudkan kemandirian desa. Alfiah (2016) menemukan bahwa kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintahan. Berdasarkan teori dan hasil penelitian tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :

Hipotesis 8: Kemandirian keuangan desa berpengaruh terhadap relasional ADD dan efisiensi kinerja keuangan desa

BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian dengan pendekatan kuantitatif yaitu metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel. Variabel-variabel ini diukur sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Noor, 2011:38). Penelitian ini menganalisis pengaruh belanja modal dan ADD terhadap efektifitas kinerja keuangan desa dan efisiensi kinerja keuangan desa melalui kemandirian keuangan desa.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian atau merupakan keseluruhan (*universum*) dari obyek penelitian (Noor, 2011:147). Populasi dalam penelitian ini adalah data realisasi APBDes di Kabupaten Jember. Untuk memperoleh seluruh data realisasi APBDes di Kabupaten Jember peneliti menemui hambatan karena adanya data yang tidak bisa diakses sehingga peneliti menggunakan sampel.

Pengambilan sampel adalah proses memilih sejumlah elemen secukupnya dari populasi sehingga penelitian terhadap sampel dan pemahaman tentang sifat dan karakteristik tersebut pada elemen populasi (Noor, 2011:149). Metode sampling menggunakan *Convenience Sampling* yaitu *non-probability sampling* dimana tehnik penentuan sampel berdasarkan kebetulan yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2012:217). Pengambilan sampel berdasarkan prinsip kemudahan dalam mengambil sampel. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan data sampai batas yang bisa diakses yaitu data realisasi APBDes periode Tahun Anggaran 2015-2016 di 53 desa di wilayah Kabupaten Jember.

3.3 Jenis dan Sumber Data

Data kuantitatif adalah jenis data yang dapat diukur atau dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau bentuk angka (Sugiyono, 2012:15). Dalam hal ini data kuantitatif yang digunakan adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain yang berkepentingan dan berkaitan dengan penelitian ini. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari pemerintah Kabupaten Jember. Data sekunder berupa Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes di 53 Desa di wilayah Kabupaten Jember tahun anggaran 2015-2016 serta data lain yang terkait dengan penelitian ini.

3.4 Definisi Operasional dan Skala Pengukuran Variabel

Variabel penelitian ini terdiri dari variabel bebas (*eksogen*) dan variabel terikat (*endogen*) serta variabel antara (*intervening*). Variabel *eksogen* pada penelitian ini adalah belanja modal dan ADD sedangkan variabel *endogen* yaitu kinerja keuangan desa dengan variabel *intervening* yaitu kemandirian keuangan desa. Berikut adalah definisi masing-masing variabel penelitian :

- a. Belanja Modal (BM) adalah belanja langsung yang dianggarkan untuk menambah aset berupa sarana dan prasarana desa di wilayah Kabupaten Jember yang dinyatakan dengan skala rasio.
- b. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan pemerintah Kabupaten Jember untuk wilayah desa di Kabupaten Jember yang disesuaikan dengan jumlah aparatur, perangkat desa, luas wilayah, jumlah penduduk, angka kemiskinan dan indeks kesulitan yang dinyatakan dalam skala rasio.
- c. Kemandirian Keuangan Desa (KKD) adalah kemampuan Pemerintah desa di Kabupaten Jember dalam membiayai pembangunannya dengan menggunakan dana yang dihasilkan oleh pemerintah desa di Kabupaten Jember sendiri diukur dengan rasio kemandirian yaitu membandingkan (PADes) dengan total pendapatan desa dan dinyatakan dalam bentuk skala rasio.
- d. Kinerja Keuangan Desa (KK) merupakan pengukuran kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember yang menitikberatkan pada efektifitas kinerja keuangan

desa yang diukur dengan rasio efektifitas (KKef) yaitu membandingkan realisasi pendapatan desa dengan total anggaran pendapatan desa yang telah ditetapkan setiap desa di Kabupaten Jember. Efisiensi terhadap kinerja keuangan desa yang diukur dengan rasio efisiensi (KKefi) yaitu membandingkan realisasi anggaran desa dengan total anggaran desa yang ditetapkan setiap desa di Kabupaten Jember dan dinyatakan dengan skala rasio.

3.5 Metode Analisis data

Penentuan nilai masing-masing variabel dalam penelitian diuraikan sebagai berikut:

a. Penentuan variabel bebas dengan cara :

- 1) Menentukan nilai variabel belanja modal yaitu sama dengan data realisasi belanja modal di setiap desa di Kabupaten Jember .
- 2) Menentukan nilai variabel ADD yaitu sama dengan data realisasi ADD di setiap desa di Kabupaten Jember.

Sedangkan untuk variabel terikat dan variabel antara (*intervening*) menggunakan rumus rasio keuangan sebagai berikut (Utama, 2008):

$$1) \text{ Rasio kemandirian daerah} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total pendapatan}} \times 100\% \quad (3.1)$$

$$2) \text{ Rasio efektifitas keuangan daerah} = \frac{\text{Realisasi pendapatan}}{\text{Anggaran pendapatan}} \times 100\% \quad (3.2)$$

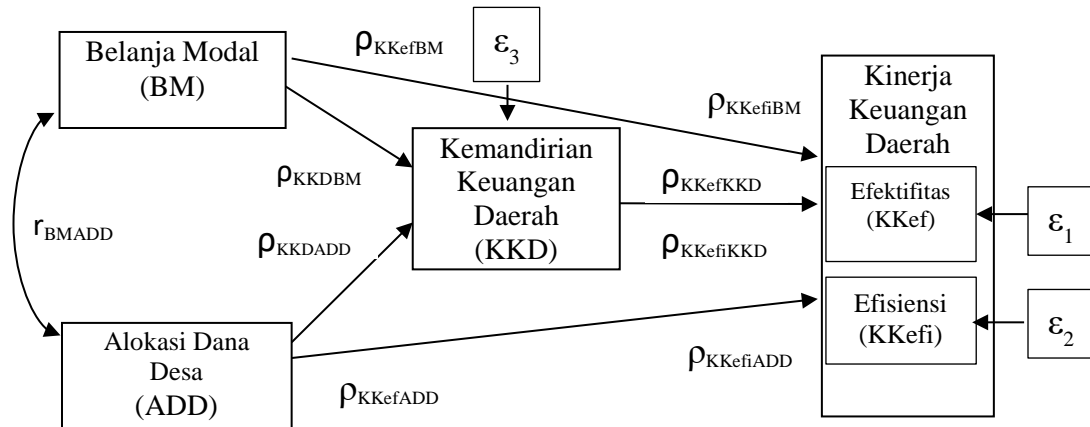
$$3) \text{ Rasio efisiensi keuangan daerah} = \frac{\text{Realisasi belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\% \quad (3.3)$$

b. Analisis Jalur

1) Menentukan Jalur

Analisis jalur (*Path Analysis*) digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan pengaruh belanja modal dan ADD terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember melalui *intervening variabel* kemandirian keuangan desa.

Model analisis jalur disajikan pada Gambar 3.1 :

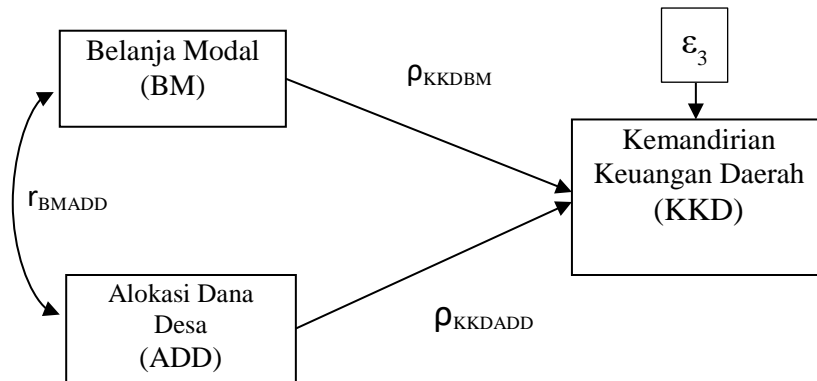


Gambar 3.1. Model Analisis Jalur (*Path Analysis*)

Keterangan :

- a) ρ_{KKefBM} : koefisien jalur pengaruh langsung belanja modal terhadap efektifitas kinerja keuangan desa.
- b) $\rho_{KKefADD}$: koefisien jalur pengaruh langsung ADD terhadap efektifitas kinerja keuangan desa.
- c) $\rho_{KKefKKD}$: koefisien jalur pengaruh langsung kemandirian keuangan daerah terhadap efektifitas kinerja keuangan desa.
- d) $\rho_{KKefiBM}$: koefisien jalur pengaruh langsung belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.
- e) $\rho_{KKefiADD}$: koefisien jalur pengaruh langsung ADD terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.
- f) $\rho_{KKefiKKD}$: koefisien jalur pengaruh langsung kemandirian keuangan daerah terhadap efisiensi kinerja keuangan desa.
- g) ρ_{KKDBM} : koefisien jalur pengaruh langsung belanja modal terhadap kemandirian keuangan desa.
- h) ρ_{KKDADD} : koefisien jalur pengaruh langsung ADD terhadap kemandirian keuangan desa.
- i) r_{BMADD} : korelasi antara belanja modal dengan ADD.

Berdasarkan Gambar 3.1, maka model struktur yang berorientasi pada efektifitas kinerja keuangan desa disajikan pada Gambar 3.2 :



Gambar 3.2. Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD terhadap KKD

Persamaan Analisis Jalur untuk Gambar 3.2 adalah

$$KKD = \rho_{KKDBM} BM + \rho_{KKDADD} ADD + \varepsilon_3 \quad (3.4)$$

Setelah mengetahui persamaan (3.4), jika berorientasi pada peran kemandirian keuangan desa maka :

- a. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung belanja modal secara parsial terhadap kemandirian keuangan desa :

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} &: KKD \leftarrow BM \rightarrow KKD \\ &= (\rho_{KKDBM}) (\rho_{KKDBM}) \end{aligned} \quad (3.5)$$

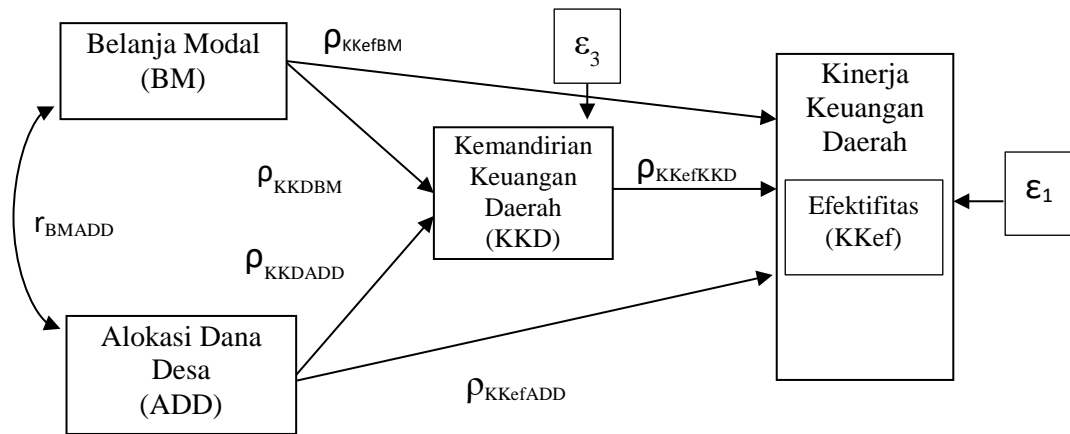
$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect atau IE} &: KKD \leftarrow BM \rightarrow ADD \rightarrow KKD \\ &= (\rho_{KKDBM}) (r_{BMADD}) (\rho_{KKDADD}) \end{aligned} \quad (3.6)$$

- b. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung ADD secara parsial terhadap kemandirian keuangan desa :

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} &: KKD \leftarrow ADD \rightarrow KKD \\ &= (\rho_{KKDADD}) (\rho_{KKDADD}) \end{aligned} \quad (3.7)$$

$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect atau IE} &: KKD \leftarrow ADD \rightarrow BM \rightarrow KKD \\ &= (\rho_{KKDADD}) (r_{BMADD}) (\rho_{KKDBM}) \end{aligned} \quad (3.8)$$

Berdasarkan Gambar 3.1, maka model struktur yang berorientasi pada peran kemandirian keuangan desa disajikan pada Gambar 3.3 :



Gambar 3.3. Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD, KKD ke KKef

Persamaan Jalur untuk Gambar 3.3 adalah

$$KK_{ef} = \rho_{KKefBM} BM + \rho_{KKefADD} ADD + \rho_{KKefKKD} KKD + \epsilon_1 \quad (3.9)$$

Setelah mengetahui persamaan (3.9), jika berorientasi pada efektifitas kinerja keuangan desa maka :

- a. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung belanja modal secara parsial terhadap efektifitas kinerja keuangan desa:

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} & : KK_{ef} \leftarrow BM \rightarrow KK_{ef} \\ & = (\rho_{KKefBM}) (\rho_{KKefBM}) \end{aligned} \quad (3.10)$$

$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect atau IE} & : KK_{ef} \leftarrow BM \rightarrow KKD \rightarrow KK_{ef} \\ & = (\rho_{KKefBM}) (\rho_{KKDBM}) (\rho_{KKefKKD}) \end{aligned} \quad (3.11)$$

$$\begin{aligned} & : KK_{ef} \leftarrow BM \rightarrow ADD \rightarrow KK_{ef} \\ & = (\rho_{KKefBM}) (r_{BMADD}) (\rho_{KKefADD}) \end{aligned} \quad (3.12)$$

$$\begin{aligned} & : KK_{ef} \leftarrow BM \rightarrow ADD \rightarrow KKD \rightarrow KK_{ef} \\ & = (\rho_{KKefBM}) (r_{BMADD}) (\rho_{KKDADD}) (\rho_{KKefKKD}) \end{aligned} \quad (3.13)$$

- b. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung ADD secara parsial terhadap efektifitas kinerja keuangan desa

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} & : KK_{ef} \leftarrow ADD \rightarrow KK_{ef} \\ & = (\rho_{KKefADD}) (\rho_{KKefADD}) \end{aligned} \quad (3.14)$$

$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect atau IE} & : \text{KKef} \leftarrow \text{ADD} \rightarrow \text{KKD} \rightarrow \text{KKef} \\ & = (\rho_{\text{KKefADD}}) (\rho_{\text{KKDADD}}) (\rho_{\text{KKefKKD}}) \end{aligned} \quad (3.15)$$

$$\begin{aligned} & : \text{KKef} \leftarrow \text{ADD} \rightarrow \text{BM} \rightarrow \text{KKef} \\ & = (\rho_{\text{KKefADD}}) (r_{\text{BMADD}}) (\rho_{\text{KKefBM}}) \end{aligned} \quad (3.16)$$

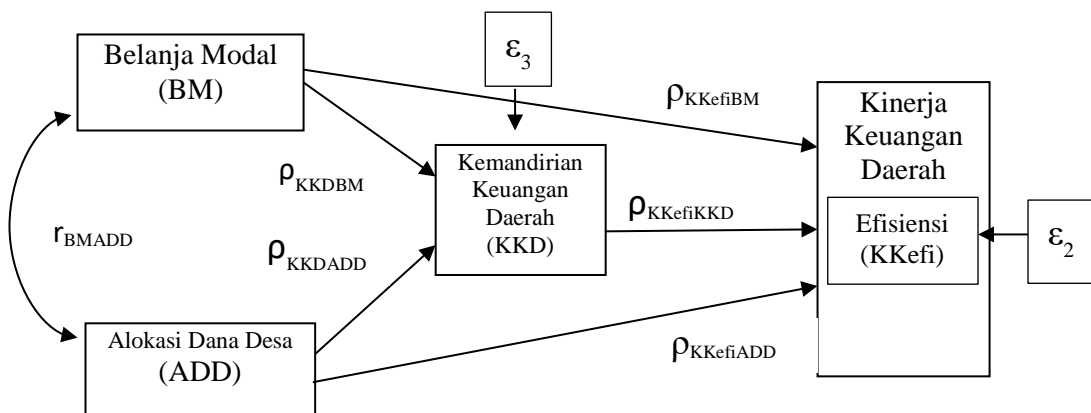
$$\begin{aligned} & : \text{KKef} \leftarrow \text{ADD} \rightarrow \text{BM} \rightarrow \text{KKD} \rightarrow \text{KKef} \\ & = (\rho_{\text{KKefADD}}) (r_{\text{BMADD}}) (\rho_{\text{KKDBM}}) (\rho_{\text{KKefKKD}}) \end{aligned} \quad (3.17)$$

- c. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung kemandirian keuangan desa secara parsial terhadap efektifitas kinerja keuangan desa :

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} & : \text{KKef} \leftarrow \text{KKD} \rightarrow \text{KKef} \\ & = (\rho_{\text{KKefKKD}}) (\rho_{\text{KKefKKD}}) \end{aligned} \quad (3.18)$$

Indirect Effect atau IE : Tidak ada

Berdasarkan Gambar 3.1, maka model struktur yang berorientasi pada efisiensi kinerja keuangan desa disajikan pada Gambar 3.4:



Gambar 3.4. Diagram Jalur hubungan kausal dari BM, ADD, KKD ke KKefi

Persamaan Jalur untuk Gambar 3.4 adalah

$$\text{KKefi} = \rho_{\text{KKefiBM}}\text{BM} + \rho_{\text{KKefiADD}}\text{ADD} + \rho_{\text{KKefiKKD}}\text{KKD} + \varepsilon_2 \quad (3.19)$$

Setelah mengetahui persamaan (3.19), jika berorientasi pada efektifitas kinerja keuangan desa maka :

- a. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung BM secara parsial terhadap efisiensi kinerja keuangan desa :

$$\text{Direct Effect atau DE} : \text{KKefi} \leftarrow \text{BM} \rightarrow \text{KKefi}$$

$$= (\rho_{KKefiBM}) (\rho_{KKefiBM}) \quad (3.20)$$

$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect atau IE} & : KKefi \leftarrow BM \rightarrow KKD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiBM}) (\rho_{KKDBM}) (\rho_{KKefiKKD}) \end{aligned} \quad (3.21)$$

$$\begin{aligned} & : KKefi \leftarrow BM \rightarrow ADD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiBM}) (\rho_{BMADD}) (\rho_{KKefiADD}) \end{aligned} \quad (3.22)$$

$$\begin{aligned} & : KKefi \leftarrow BM \rightarrow ADD \rightarrow KKD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiBM}) (\rho_{BMADD}) (\rho_{KKDADD}) (\rho_{KKefiKKD}) \end{aligned} \quad (3.23)$$

- b. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung ADD secara parsial terhadap efisiensi kinerja keuangan desa :

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} & : KKefi \leftarrow ADD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiADD}) (\rho_{KKefiADD}) \end{aligned} \quad (3.24)$$

$$\begin{aligned} \text{Indirect Effect atau IE} & : KKefi \leftarrow ADD \rightarrow KKD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiADD}) (\rho_{KKDADD}) (\rho_{KKefiKKD}) \end{aligned} \quad (3.25)$$

$$\begin{aligned} & : KKefi \leftarrow ADD \rightarrow BM \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiADD}) (\rho_{BMADD}) (\rho_{KKefiBM}) \end{aligned} \quad (3.26)$$

$$\begin{aligned} & : KKefi \leftarrow ADD \rightarrow BM \rightarrow KKD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiADD}) (\rho_{BMADD}) (\rho_{KKDBM}) (\rho_{KKefiKKD}) \end{aligned} \quad (3.27)$$

- c. Besarnya pengaruh langsung dan tidak langsung kemandirian keuangan desa secara parsial terhadap efisiensi kinerja keuangan desa :

$$\begin{aligned} \text{Direct Effect atau DE} & : KKefi \leftarrow KKD \rightarrow KKefi \\ & = (\rho_{KKefiKKD}) (\rho_{KKefiKKD}) \end{aligned} \quad (3.28)$$

Indirect Effect atau IE : Tidak ada

Keterangan :

KKef	= efektifitas kinerja keuangan desa
KKefi	= efisiensi kinerja keuangan desa
KKD	= kemandirian keuangan desa
BM	= belanja modal
ADD	= Alokasi Dana Desa
ε_1	= residual struktur 1
ε_2	= residual struktur 2
ε_3	= residual struktur 3

2) Uji Koefisien Jalur

Setelah menentukan koefisien jalur maka koefisien jalur yang diperoleh harus diuji signifikansinya dengan menggunakan uji-t.

$$H_0 : \rho_i = 0$$

$$H_1 : \rho_i \neq 0, \text{ dimana } i = 1,2,3$$

Jika $\rho\text{-value} < \alpha$ maka H_0 ditolak dan sebaliknya $\rho\text{-value} > \alpha$ maka H_0 diterima.

Berdasarkan uji signifikan mungkin diperoleh koefisien jalur yang signifikan dan tidak signifikan. Berdasarkan *Trimming Theory*, koefisien jalur yang tidak signifikan dapat dihilangkan/dihapus. Artinya, terdapat jalur atau sub-struktur dalam diagram jalur yang dihilangkan, sehingga diperoleh struktur yang baru. Selanjutnya berdasarkan struktur baru tersebut dihitung kembali dari awal untuk masing-masing koefisien jalurnya (Sukarno, 2004).

BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang diajukan yaitu :

Belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. Besarnya anggaran belanja modal desa yang ditetapkan dan direalisasikan tidak dapat menentukan tingkat kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD tidak mempunyai dampak terhadap kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember. Jumlah ADD yang diterima dan direalisasikan masing-masing desa tidak membantu suatu desa mencapai kemandirian keuangan desanya.

Belanja modal secara langsung berpengaruh negatif terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. belanja modal melalui ADD tidak dapat menentukan efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD tidak berpengaruh terhadap efektifitas kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember baik langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal. Kemandirian keuangan desa di Kabupaten Jember tidak berperan dalam mewujudkan efektifitas kinerja keuangan desa.

Belanja modal baik langsung maupun tidak langsung melalui ADD berpengaruh terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. ADD berperan langsung maupun tidak langsung melalui belanja modal terhadap efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember.

3.2 Implikasi Penelitian

Penelitian ini berimplikasi bagi

Pemerintah Kabupaten Jember, karena penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh belanja modal, ADD, kemandirian keuangan desa terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa. Informasi ini dapat dimanfaatkan pemerintah Kabupaten Jember sebagai fungsi pengawasan dan

pendampingan pada pemerintah desa dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan penyusunan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap APBDes.

Pemerintah Pusat, karena penelitian ini memberikan informasi tentang pengaruh pemberian ADD dan prakteknya di pemerintahan desa. Informasi ini diharapkan dapat memberikan masukan dalam pengambilan keputusan berkaitan dengan keuangan daerah khususnya di tingkat desa.

Penelitian selanjutnya, hasil penelitian ini berkaitan dengan keuangan daerah khususnya tentang pengaruh belanja modal desa, ADD, kemandirian keuangan desa terhadap efektifitas dan efisiensi kinerja keuangan desa di Kabupaten Jember. Diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi dan wawasan bagi penelitian lainnya terutama yang berminat pada keuangan desa.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan wawasan terutama berkaitan dengan keuangan daerah tingkat desa di Indonesia.

3.3 Keterbatasan Penelitian

- a. Penelitian ini menemui hambatan dalam pengumpulan data Laporan Pertanggungjawaban APBDes sehingga dari 226 desa peneliti hanya memperoleh data Laporan Pertanggungjawaban APBDes dari 53 desa. Hal ini dikarenakan masih banyak desa yang belum menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban APBDes tahun anggaran 2016 saat penelitian dilakukan pada bulan Januari – Maret 2017.
- b. Obyek yang digunakan dalam penelitian ini pada tingkat desa di Kabupaten Jember sehingga tingkat generalisasi hasil penelitian masih terbatas.

3.4 Saran

- a. Sebaiknya penelitian selanjutnya menambah waktu penelitian dan memilih waktu yang tepat untuk penelitian sehingga pengumpulan data dapat dilakukan sesuai tujuan penelitian.

- b. Untuk memperluas sampel penelitian hendaknya dengan membandingkan antar desa diluar wilayah Kabupaten Jember sehingga dapat meningkatkan generalisasi hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Muhammad Zainul. 2016. Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa Dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Bisnis*, vol. 6 Juni 2015, PP 61-76.
- Alfiah, Ikmal Fitriyani. 2016. Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat. *Thesis*. Padang: Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Asni, Fauzi, Maryunani dan Sasongko. 2013. The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau). *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM) ISSN: 2278-487X, p-ISSN: 2319-7668. Volume 10, Issue 4 (May. - Jun. 2013), PP 01-09.*
- Bastian, Indra. 2010. *Akuntansi Sektor Public Suatu Pengantar*. Edisi Ketiga, Jakarta: Erlangga.
- Kosasi, Felli. 2016. DAU 247 Milyar Dipotong Pusat, Pemkab Jember Prioritaskan Anggaran Dasar. *birojember.com*. [Diakses 16 September 2016)
- Darwis, 2015. Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat. *Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang vol 3, no 1.*
- Halim, Abdul. 2012. *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4, Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2014. *Manajemen Keuangan Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Jackson, P.M and B. Palmer, 1992. Developing Performance Monitoring in Public Sector. *The Management Centre, University of Leicester*.
- Mamesah. 1995, *Sistem Administrasi Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Mardiasmo. 2007, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi 3. Yogyakarta: ANDI.
- Mardiasmo. 2009, *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi 3. Yogyakarta: ANDI.

- Mihaiu, Diana Marieta. 2013. The Analysis of the Relationship Between the Level of the Public Expenditure for Investments and de Degree of Development of the Society in Romania. *Procedia Economics and Finance* 6 (2013) 654 – 661.
- Menkhoff, Lukas and Ornshiri Rungruxsirivorn. 2011. Do Village Funds Improve Access to Finance? Evidence from Thailand. *World Development* Vol. 39, No. 1, pp. 110–122, 2011.
- Mone, Indah Yuliani. 2012). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep. *Jurnal Akuntansi Akuntansi dan Keuangan sektor Publik Universitas Hasanudin Makassar*. Vol 8 no 1.
- Noor, Juliansyah. 2011. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Pranadamedia Group.
- Nugroho, Fajar. 2012. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *Diponegoro Journal of Accounting* vol.1 No. 1 page 47-59.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. 9 Desember 2005. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015. *Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara*. 29 April 2015. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. *Standar Akuntansi Pemerintahan*. 22 Oktober 2010. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 15 Mei 2006. Jakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. *Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*. 23 Mei 2011. Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310. Jakarta.
- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 37 tahun 2007. *Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa*. 27 Juli 2007. Jakarta.

- Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*. 31 Desember 2014. Berita Acara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 2093. Jakarta.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.06/2007. *Bagan Akun Standar*. 30 Agustus 2007. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 357. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.02/2011. *Klasifikasi Anggaran*. 11 Juli 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 397. Jakarta
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 249/PMK.02/2011. *Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga*. 28 Desember 2011. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 938. Jakarta
- Prasetyanto, Eko. 2012. Dampak alokasi dana desa pada era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian daerah di Indonesia. *Disertasi*. Bogor: Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor.
- Puspitasari, Ni Luh Putu. 2015. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha vol. 3(1)*.
- Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintah Daerah*. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Sukarno, Hari. 2004. Analisis Jalur (Path Analysis): Sebuah Pendekatan Analisis Problematika Struktural. *Jurnal Akuntansi Universitas Jember vol.2.no.2*
- Sukarni, Ni Wayan. 2016. Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana:545-572*.
- Sugiyono, 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.
- Thomas. 2013. Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebangung kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung. *eJournal Pemerintahan Integratif*, 1(1):51-64.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. 15 Oktober 2004. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126. Jakarta.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. *Pemerintah Daerah*. 2 Oktober 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Jakarta.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014. *Desa*. 15 Januari 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7. Jakarta.

Utama, Made Suyana. 2008. Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan asli Daerah dan Pengaruhnya terhadap Kinerja serta Kemandirian Keuangan Daerah. *Journal Fakultas Ekonomi Udayana*.

Wirawan, Oryza. 2016. Belanja Modal APBD Jember 2015 Tak Terealisasi 23 Persen. beritajatim.com. [Diakses pada 21 September 2016]

INDEKS ISTILAH

A

Alokasi Dana Desa (ADD), 6, 7, 8, 9,14, 16,18, 19,20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64.

Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM), 15.

Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDP), 15.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), 2 ,3, 7,16, 35, 37, 55.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), 2, 3, 6, 9,10,18, 26.

B

Belanja Modal (BM), 6, 7, 8, 9,13, 15, 16,18, 19,20, 22, 23, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 38, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

D

Dana Alokasi Umum (DAU), 5, 6, 18

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), 5.

E

Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah (KKef), 7, 8, 9,18,20, 26, 28, 30, 31, 32, 40, 41, 47, 48, 49, 54, 55, 56, 57, 58, 63, 64, 65.

Efisiensi Kinerja Keuangan (KKefi),7, 8, 9, 22, 23, 27, 28, 32, 33, 41, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65.

K

Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), 7, 8, 9,12,20, 24, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64.

Kinerja Keuangan Daerah (KK), 26.

P

Pendapatan Asli Daerah (PAD), 4,12, 16, 21, 23, 35, 36, 55.

Pendapatan Asli Desa (PADes), 38, 56, 57, 58, 61.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 16,20.

S

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), 13.

LAMPIRAN 1.1								
REALISASI PENDAPATAN KABUPATEN JEMBER								
TAHUN ANGGARAN 2011-2016								
NOMOR	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	PENDAPATAN							
	Pendapatan Asli Daerah	182.494.390.158,79	255.804.775.083,72	308.376.581.785,68	440.462.012.490,69	461.882.363.146,93	524.955.111.848,96	
	Pajak Daerah	40.708.973.394,50	55.147.114.711,00	95.188.144.409,05	116.578.557.515,50	123.210.707.077,00	136.545.418.829,29	
	Retribusi Daerah	20.816.368.771,00	40.417.112.857,00	44.192.346.021,00	62.592.167.395,00	34.452.393.109,00	36.024.234.501,00	
	Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	15.290.566.018,82	15.225.383.199,17	11.411.667.411,06	8.591.234.367,63	5.282.747.387,50	5.410.275.625,00	
	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	105.678.481.974,47	145.015.164.316,55	157.584.423.944,57	252.700.053.211,56	298.936.515.573,43	346.975.182.893,67	
	Dana Perimbangan	1.250.834.951.524,00	1.484.110.400.708,00	1.588.896.753.256,00	1.746.847.365.217,00	1.917.759.331.546,00	2.278.556.031.155,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	92.589.279.524,00	109.449.896.708,00	96.881.881.256,00	119.173.767.217,00	131.764.719.546,00	138.965.088.155,00	
	Dana Alokasi Umum	1.058.648.472.000,00	1.279.295.764.000,00	1.417.603.982.000,00	1.539.722.508.000,00	1.586.836.602.000,00	1.709.892.845.000,00	
	Dana Alokasi Khusus	99.597.200.000,00	95.364.740.000,00	74.410.890.000,00	87.951.090.000,00	199.158.010.000,00	429.698.098.000,00	
	Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan dari Propinsi	-	-	-	-	-	-	
	Lain-lain Pendapatan yang Sah	448.954.440.924,00	406.175.043.069,00	469.097.504.490,00	610.159.181.762,00	736.902.684.218,00	386.502.489.801,00	
	Pendapatan Hibah	-	-	481.647.500,00	1.427.032.450,00	5.425.336.300,00	-	
	Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	88.738.658.201,00	89.496.923.185,00	101.286.332.287,00	170.864.414.334,00	168.780.357.918,00	176.117.385.301,00	
	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	321.544.541.520,00	267.666.607.000,00	345.099.902.500,00	414.816.348.000,00	539.166.157.000,00	195.535.358.000,00	
	Bantuan Keuangan dari Propinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	38.509.054.500,00	48.769.470.000,00	22.062.160.000,00	22.707.570.000,00	23.530.833.000,00	14.849.746.500,00	
	Dana Bagi Hasil Retribusi	162.186.703,00	242.042.884,00	167.462.203,00	343.816.978,00	-	-	

LAMPIRAN 1.2								
REALISASI BELANJA KABUPATEN JEMBER								
TAHUN ANGGARAN 2011-2016								
NOMOR	URAIAN	TAHUN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN		TAHUN ANGGARAN
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	
1	2	3	4	5	6	7	8	
	BELANJA	1.784.833.475.919,86	2.087.832.260.014,31	2.348.129.104.082,10	2.694.831.111.193,77	3.083.637.991.190,61	2.979.961.948.690,17	
	Belanja Tidak Langsung	1.215.387.171.850,26	1.341.520.592.173,92	1.451.163.344.371,43	1.594.671.680.601,84	1.884.935.329.529,61	1.895.377.503.125,05	
	Belanja Pegawai	991.592.477.848,72	1.141.006.750.876,42	1.241.166.869.757,43	1.356.925.343.076,36	1.379.160.389.246,61	1.440.118.736.429,05	
	Belanja Bunga	22.724.282,54	16.014.946,50	8.744.465,00	1.734.751,22			
	Belanja Hibah	66.367.464.684,00	45.637.795.000,00	66.726.801.563,00	85.525.239.100,26	200.902.212.250,00	45.445.193.486,00	
	Belanja Bantuan Sosial	46.346.740.000,00	46.764.840.000,00	38.738.296.500,00	47.261.831.500,00	44.493.752.075,00	52.317.524.000,00	
	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	769.822.495,00	820.011.580,00	886.584.593,00	849.380.490,00	13.938.049.034,00	13.632.616.998,00	
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	106.917.562.678,00	106.891.894.771,00	101.755.513.493,00	104.108.151.684,00	246.415.470.770,00	343.863.432.212,00	
	Belanja Tidak Terduga	3.370.379.862,00	383.285.000,00	1.880.534.000,00	-	25.456.154,00	-	
	Belanja Langsung	569.446.304.069,60	746.311.667.840,39	896.965.759.710,67	1.100.159.430.591,93	1.198.702.661.661,00	1.084.584.445.565,12	
	Belanja Pegawai	69.113.529.037,00	65.959.659.596,00	79.066.017.470,00	87.062.127.710,00	104.154.605.870,00	111.022.567.447,00	
	Belanja Barang dan Jasa	290.271.086.947,85	307.608.212.293,31	339.322.344.928,67	475.576.046.849,93	538.139.170.648,00	513.084.397.271,12	
	Belanja Modal	210.061.688.084,75	372.743.795.951,08	478.577.397.312,00	537.521.256.032,00	556.408.885.143,00	460.477.480.847,00	

LAMPIRAN 2.1

Ringkasan penelitian terdahulu yang menguji pengaruh belanja modal dan dana alokasi dana desa dapat dilihat sebagai berikut :

Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
1 Mone (2012)	Pengaruh pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja ekonomi daerah di Kabupaten Pangkep	Kuantitatif Regresi Linier Berganda Variabel : Belanja daerah, Kinerja Ekonomi Daerah	Pengelolaan keuangan daerah berdasarkan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja ekonomi daerah. Secara parsial pendapatan daerah berpengaruh positif dan signifikan, belanja daerah berpengaruh positif dan tidak signifikan serta pembiayaan daerah berpengaruh negatif dan signifikan.	Persamaan: Metode kuantitatif, Var : Belanja daerah Perbedaan : Regresi Linier berganda Vari :kinerja ekonomi
2 Nugroho (2012)	Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai variabel <i>intervening</i>	Kuantitatif PLS Variabel: Pertumbuhan Kinerja Keuangan, PAD, Belanja Modal	Belanja Modal berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan kinerja keuangan daerah secara langsung, sedangkan secara tidak langsung Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan melalui Pendapatan Asli daerah sebagai variabel <i>intervening</i> .	Persamaan : Metode kuantitatif Var :BM dan Kinerja keuangan Perbedaan : PLS Var : PAD
3 Prasetyanto (2012)	Dampak alokasi dana desa pada era Desentralisasi Fiskal Terhadap Perekonomian daerah di Indonesia	Kualitatif	ADD mampu meningkatkan kinerja fiskal dan perekonomian daerah, mampu mengurangi jumlah penduduk miskin dan meningkatkan produk domestik regional bruto sektor pertanian.	Persamaan : Var : ADD Perbedaan : Kualitatif Var : Pereko- Nomian daerah

Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
4 Thomas (2013)	Pengelolaan alokasi dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan di desa sebawang kecamatan sesayap Kabupaten Tana Tidung	Deskriptif kualitatif	30% dari dana ADD bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan sisanya kurang optimal. Rendahnya sumber daya manusia aparat desa dan kurangnya koordinasi tentang pengelolaan ADD disinyalir menjadi hambatan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa.	Persamaan : Var : ADD Perbedaan : Metode Kualitatif
5 Asni (2013)	<i>The Management of the Village Fund Allocation as an Instrument towards Economic Independence Village (Case Studies in 2 villages in Siak Regency, Province Riau)</i>	Kualitatif fenomenologi	Alokasi Desa dana yang diberikan kepada desa dari dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah mampu menjadi instrumen dalam mendukung kemandirian desa.	Persamaan : Var : ADD Perbedaan : Metode Kualitatif Fenomenologi
6 Darwis (2015)	Pengaruh Belanja Modal dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten/Kota Propinsi Sumatera Barat.	Kuantitatif regresi Linier berganda Variabel: Kemandirian Keuangan daerah, belanja modal, belanja pegawai	Belanja modal berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah.	Persamaan : Metode Kuantitatif Var :Kemandirian, BM Perbedaan : Regresi Linier Berganda
7 Puspitasari (2015)	Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Kinerja Keuangan Daerah dengan Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel <i>Intervening</i>	Kuantitatif Regresi dan <i>path analysis</i> Variabel: Belanja modal, pendapatan asli daerah, Kinerja	Belanja modal secara signifikan mempengaruhi Pertumbuhan kinerja keuangan. Sedangkan belanja modal dapat berpengaruh langsung ke kinerja dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari belanja modal ke Pendapatan Asli Daerah (sebagai variabel <i>intervening</i>) lalu ke kinerja.	Persamaan : Kuantitatif Var : BM Perbedaan : Regresi Var : PAD

Nama Peneliti	Judul	Metode Analisis	Hasil Penelitian	Persamaan /Perbedaan
8 Sukarni (2016)	Alokasi Belanja Modal Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kinerja Keuangan pada Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Kuantitatif Regresi Linier Berganda Variabel: Kinerja keuangan Belanja modal, Pertumbuhan ekonomi	Secara umum alokasi belanja modal memperkuat pengaruh kinerja keuangan pada pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengaruh desentralisasi, efektivitas PAD, kemandirian keuangan dan derajat kontribusi BUMD pada pertumbuhan ekonomi interaksi alokasi belanja modal menunjukkan hasil yang tidak signifikan.	Persamaan : Kuantitatif Var: BM, Kinerja keu Perbedaan : Regresi Linier Berganda Var: Pertumbuhan ekonomi
9 Ikmal Fitri Alfiah (2016)	Pengaruh Tingkat Kemandirian Keuangan daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Barat	Kuantitatif Regresi Linier Variabel: Kemandirian Keuangan, Kinerja	Kemandirian keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah	Persamaan : Kuantitatif Var: kemandirian, Kinerja Keu Perbedaan : Regresi linier berganda

Sumber : Mone (2012), Nugroho (2012), Prasetyanto (2012), Thomas (2013), Darwis (2015), Nurhayati (2015), Puspitasari (2015), Sukarni (2016), Alfiah (2016).

LAMPIRAN 4.1

Nama Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan Tahun 2016

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Dusun/Lingk	Jumlah RW	Jumlah RT	Luas
1.	Kencong	5	24	123	526	65,92
2.	Gumukmas	8	24	159	453	82,98
3.	Puger	12	37	228	658	148,99
4.	Wuluhan	7	25	126	719	137,18
5.	Ambulu	7	27	200	641	104,56
6.	Tempurejo	8	29	109	441	524,46
7.	Silo	9	41	213	622	309,98
8.	Mayang	7	24	109	347	63,78
9.	Mumbulsari	7	26	86	463	95,13
10.	Jenggawah	8	36	97	533	51,02
11.	Ajung	7	33	113	491	56,61
12.	Rambipuji	8	42	150	517	52,80
13.	Balung	8	27	100	369	47,12
14.	Umbulsari	10	26	153	450	70,52
15.	Semboro	6	14	114	326	45,43
16.	Jombang	6	17	134	402	54,30
17.	Sumberbaru	10	36	166	599	166,37
18.	Tanggul	8	24	140	507	199,99
19.	Bangsalsari	11	40	253	569	175,28
20.	Panti	7	26	91	423	160,71
21.	Sukorambi	5	16	78	258	60,63
22.	Arjasa	6	26	64	249	43,75
23.	Pakusari	7	26	96	293	29,11
24.	Kalisat	12	51	151	473	53,48
25.	Ledokombo	10	39	147	422	146,92
26.	Sumberjambe	9	58	103	426	138,24
27.	Sukowono	12	27	142	403	44,04
28.	Jelbuk	6	42	78	236	65,06
29.	Kaliwates	7	32	152	490	24,94
30.	Sumbersari	7	33	152	505	37,05
31.	Patrang	8	38	119	404	36,99
	Jumlah	248	966	4.146	14.215	3.293,34

Sumber : Data Pada Bagian Pemerintahan Desa Setkab Jember Tahun 2016

LAMPIRAN 4.2

Deskripsi Statistik BM, ADD, KKD, KKef, KKefi Tahun 2015

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	53	234046010,00	703452698,00	490717047,6604	102331202,46368
ADD	53	708308670,00	956486466,00	777874335,7736	51599735,61247
KKD	53	,01	,41	,0968	,08820
KKef	53	,99	1,07	1,0011	,00974
KKefi	53	,98	1,00	,9989	,00423
Valid N (listwise)	53				

Deskripsi Statistik BM, ADD, KKD, KKef, KKefi Tahun 2016

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
BM	53	270985063,0000	994543007,0000	718221906,716981	135098114,1696249
ADD	53	696207881,0000	916898156,0000	807226701,490566	40533181,4315138
KKD	53	,0000	,3500	,081509	,0803692
KKef	53	,9400	1,0600	,994717	,0179319
KKefi	53	,9400	1,0000	,987358	,0154610
Valid N (listwise)	53				

LAMPIRAN 4.3

Korelasi BM dengan ADD

Correlations

		BM	ADD
BM	Pearson Correlation	1	,226*
	Sig. (2-tailed)		,020
	N	106	106
ADD	Pearson Correlation	,226*	1
	Sig. (2-tailed)	,020	
	N	106	106

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Korelasi Belanja Modal (BM), Alokasi Dana Desa (ADD), Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (KKD), Rasio Efektifitas Kinerja Keuangan Daerah (KKef), Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah (KKefi)

Correlations

		BM	ADD	KKD	KKef	KKefi
BM	Pearson Correlation	1	,226*	-,126	-,218*	-,439**
	Sig. (2-tailed)		,020	,199	,025	,000
	N	106	106	106	106	106
ADD	Pearson Correlation	,226*	1	-,136	-,088	,182
	Sig. (2-tailed)	,020		,165	,370	,062
	N	106	106	106	106	106
KKD	Pearson Correlation	-,126	-,136	1	-,003	,158
	Sig. (2-tailed)	,199	,165		,976	,105
	N	106	106	106	106	106
KKef	Pearson Correlation	-,218*	-,088	-,003	1	,178
	Sig. (2-tailed)	,025	,370	,976		,068
	N	106	106	106	106	106
KKefi	Pearson Correlation	-,439**	,182	,158	,178	1
	Sig. (2-tailed)	,000	,062	,105	,068	
	N	106	106	106	106	106

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

LAMPIRAN 4.4

Hasil Analisis Jalur terhadap Kemandirian

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension 1 0	,167 ^a	,028	,009	,083941

a. Predictors: (Constant), ADD, BM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,021	2	,010	1,481	,232 ^a
	Residual	,726	103	,007		
	Total	,747	105			

a. Predictors: (Constant), ADD, BM

b. Dependent Variable: KKD

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,276	,134		2,056	,042
	BM	-5,119E-11	,000	-,100	-1,005	,317
	ADD	-1,966E-10	,000	-,113	-1,133	,260

a. Dependent Variable: KKD

LAMPIRAN 4.5

Hasil Analisis Jalur terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
Dimension 01	KKD, BM, ADD ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kkef

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
Dimension 0 1	,224 ^a	,050	,022	,014552

a. Predictors: (Constant), KKD, BM, ADD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,001	3	,000	1,802	,152 ^a
	Residual	,022	102	,000		
	Total	,023	105			

a. Predictors: (Constant), KKD, BM, ADD

b. Dependent Variable: Kkef

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,021	,024		43,004	,000
	BM	-1,892E-11	,000	-,212	-2,133	,035
	ADD	-1,360E-11	,000	-,045	-,449	,654
	KKD	-,006	,017	-,036	-,365	,716

a. Dependent Variable: Kkef

LAMPIRAN 4.6

Hasil Analisis Jalur terhadap Efektifitas Kinerja Keuangan setelah *Trimming*

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
dimension0 1	BM ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kkef

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,218 ^a	,048	,038	,014432

a. Predictors: (Constant), BM

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1,010	,005		189,034	,000
	BM	-1,942E-11	,000	-,218	-2,278	,025

a. Dependent Variable: Kkef

LAMPIRAN 4.7

Hasil Analisis Jalur terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
dimension0 1	KKD, BM, ADD ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kkefi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,543 ^a	,294	,274	,010804

a. Predictors: (Constant), KKD, BM, ADD

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	3	,002	14,185	,000 ^a
	Residual	,012	102	,000		
	Total	,017	105			

a. Predictors: (Constant), KKD, BM, ADD

b. Dependent Variable: Kkefi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,949	,018		53,882	,000
	BM	-3,774E-11	,000	-,492	-5,732	,000
	ADD	8,149E-11	,000	,312	3,627	,000
	KKD	,021	,013	,139	1,646	,103

a. Dependent Variable: Kkefi

LAMPIRAN 4.8

Hasil Analisis Jalur terhadap Efisiensi Kinerja Keuangan Daerah setelah *Trimming*

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
dimension0 1	ADD, BM ^a	.	Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: Kkefi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
dimension0 1	,525 ^a	,276	,262	,010893

a. Predictors: (Constant), ADD, BM

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,005	2	,002	19,598	,000 ^a
	Residual	,012	103	,000		
	Total	,017	105			

a. Predictors: (Constant), ADD, BM

b. Dependent Variable: Kkefi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,955	,017		54,857	,000
	BM	-3,881E-11	,000	-,506	-5,874	,000
	ADD	7,739E-11	,000	,296	3,437	,001

a. Dependent Variable: Kkefi

AUTOBIOGRAFI



Dinna Tri Yulihantini

Lahir di Jember, 24 Juli 1976, memperoleh gelar Ahli Madya Public Relations Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tahun 1999. Pernah bekerja di UMC Surabaya, Humas Universitas Jember, BNI Cabang Jember dan Telkomsel Surabaya. Sejak tahun 2003 bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Awal karir menjadi staf protokol kemudian diperbantukan menjadi staf pengelola keuangan Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Jember. Tahun 2012 memutuskan menyelesaikan jenjang pendidikan S1 di bidang Ekonomi dan tahun 2015 mendapat kesempatan melanjutkan studi S2 dari program STAR BPKP di Program Studi Magister Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.